

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- _____, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: Mandar Maju, 2006)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, *Tuntutan Pembuatan Akta Tanah*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020)
- B. F. Sihombing, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2014)
- Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001)
- F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Ganda, 2007)
- Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017)
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002)
- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Joeniarso, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1968)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1989)
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2001)
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
- Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1952)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- _____, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Pieter Latumenten, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accessoir*, (Bandung: Malafi, 2016)
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur, 1994)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

- Salim, H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- _____ dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006)
- Soediman Kartohadiprodo, *Negara Republik Indonesia Negara Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1953)
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)
- Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995)
- Solahudin Pugung, *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya serta Tanggung Jawab PPAT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979)
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017)
- _____, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta, Kencana, 2016)
- _____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- _____, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Kencana, 2015)
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mazdar Madju, 2000)
- _____, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971)
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986)

B. Jurnal:

- Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3 Desember 2014. DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29562.
- Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1, No. 1 Mei 2020. DOI: 10.31000/ijlp.v1i1.2655
- Alfitri, "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitsi*, Vol. 9, No. 3 September 2012. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk932>
- Aniken Yustisia Syahnaz, "Korelasi antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i1.1624>
- Feri Irawan Widiyatmoko dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 7 Juli 2022. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/87155>
- I Nyoman Sumardiana, *et.al*, "Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juli 2020. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.187-191>
- Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2, No. 1 April 2016. DOI: <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>
- Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 2 Desember 2015. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.165>
- Pintami Nanda Intoyo Putri, *et.al*, "Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Rechtens*, Vol. 11, No. 2 Desember 2022. DOI:10.56013/rechtens.v11i2.1446
- Sahmiar Pulungan, *et.al*, "Analisis Komparatif Putusan Perkara Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Klaten", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 001, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i001.4075>
- Sri Putri Amalia Jamal, *et.al*, "E-Complaints For SG (Social Grants): Upaya Preventif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi", *Jurnal Legislatif*, Vol. 4, No. 2 Juni 2021. DOI: 10.20956/jl.vi.14594

Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2 Agustus 2013. DOI: <https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359>

Siti Sumartini, *et.al*, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1 Maret 2021. DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p224-242

Suwardi dan Arief Dwi Atmoko, "Esensi Peralihan Hak Kepemilikan Melalui Jual Beli Atas Tanah Sesuai Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25139/lex.v4i2.3378>

Zahra Apritania Jati, "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 4, No. 2, Februari 2021. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130>

C. Hasil Penelitian:

Adetya Bagus Wirawan, "Peran Dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Menuju Clean Government". Skripsi, Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013

D. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395)

E. Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 773/Pdt.G/2014/PN.Dps

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 152/PDT/2015/PT.DPS

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1552 K/PDT/2019

F. Internet:

Andi Rustandi, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://www.andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>

Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>

G. Kamus:

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Ninth Edition, (West Group St. Paul, 2009)